

SOSIALISASI PAJAK DAERAH BAGI SISWA-SISWI SMA

Yuniarwati¹, Andriani R. N.², Visyka Suprpto³

¹Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat
email : yuniarwati@fe.untar.ac.id

²Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat
email : andriani.najmani@yahoo.com

³Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
email : vikasuprpto@gmail.com

ABSTRACT

The activity of engagement to community this time is partnered with Bhinneka Tunggal Ika (BTI) Senior High School. In addition to curricular learning in class, students are also provided with general knowledge and insight. This activity aims to make students know and understand about Regional Taxes. With the hope that they will become obedient local taxpayers. This PKM activity was held at the school location, Jl. K. H. Moh. Mansyur No. 222 A, Tanah Sereal, Tambora. This activity was held in one of the meeting rooms on Tuesday, September 13, 2022. After the presentation of the material, a discussion and question and answer session was held. This activity was attended by class XII and several teachers.

Keywords: *Engagement to Community, Regional Tax, Bhinneka Tunggal Ika (BTI) Senior High School*

ABSTRAK

Pada aktivitas PKM kali ini, kami bermitra dengan SMA Bhinneka Tunggal Ika (BTI). Selain belajar kurikuler di kelas, para siswa juga dibekali dengan pengetahuan dan wawasan yang bersifat umum. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para siswa dapat memahami Pajak Daerah. Dengan harapan mereka akan menjadi Wajib Pajak (WP) Daerah yang taat. Aktivitas PKM ini diadakan di lokasi sekolah, Jl. K. H. Moh. Mansyur No. 222 A, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora. Kegiatan diadakan di salah satu ruang pertemuan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022. Setelah pemaparan materi, diselenggarakan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini diikuti kelas XII dan beberapa orang pengajar / guru.

Kata kunci: *PKM, Pajak Daerah, SMA Bhinneka Tunggal Ika*

1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Sekolah Bhinneka Tunggal Ika (BTI) pada awalnya didirikan oleh alm. Bpk. Djoko Haryono (www.btika.sch.id). Pada awalnya, sekolah ini bernama Ta Tung. Pendirian sekolah ini didasari pada kepedulian terhadap dunia pendidikan pada tahun 1968 karena terdapat banyak siswa yang putus atau tidak bersekolah sama sekali. Kemudian pada tahun 1971, atas inisiatif alm. Bpk Mohammad Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden, Sekolah ini kemudian berganti nama menjadi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika (BTI), yang merupakan sekolah asimilasi di Indonesia yang pertama, dengan cita-cita membentuk generasi bangsa tanpa memandang suku, agama, ras, dan kepercayaan.

Hingga saat ini, Sekolah BTI yang berasas Pancasila, berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, yang turut serta di dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dan pelayanan sosial lainnya, bermaksud untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang terampil dan mahir di berbagai bidang. Sekolah BTI menyediakan program pendidikan umum dan kejuruan dalam koridor untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara membentuk pribadi yang utuh dan dapat menghargai perbedaan. Berikut ini adalah foto-foto Sekolah BTI.



Di bawah ini adalah visi dan misi SMA BTI:

Visi: “Sebagai lembaga pendidikan nasional terkemuka dan modern yang turut serta menciptakan generasi penerus bangsa pada Ilmu, Iman, serta Karakter tanpa memandang Suku, Ras, dan Agama, berasaskan Pancasila.”

Misi: “Berbagi potensi peserta didik secara optimal melalui Pendidikan Karakter, pengajaran Bermutu, Toleran dan Menghargai seluruh disparitas yang ada, melalui siswa yang dipercayakan Orang Tua serta Wali siswa pada Kami sebagai forum Pendidik Terpercaya pada Sekolah Bhinneka Tunggal Ika dilakukan: (a) pendidikan karakter (b) pengajaran bermutu (c) menekankan rasa toleran serta (d) menghargai perbedaan.”

Kesadaran untuk membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara yang baik, yang harus dicanangkan kepada para siswa semenjak dini. Kesadaran ini akan berkembang dengan baik pada saat mereka menjadi Wajib Pajak di kemudian hari. Para siswa SMA BTI merupakan bagian dari masyarakat yang akan segera menjadi Wajib Pajak, karena mereka akan memiliki penghasilan yang berasal dari pekerjaan, usaha pribadi, atau investasi.

1.2 Permasalahan Mitra

Sekolah BTI memiliki tujuan untuk memberikan pengajaran yang bermutu tinggi kepada para siswanya. Pengajaran tidak hanya dilakukan oleh pengajar-pengajar pengampu, namun pula mengundang para pakar yang berasal dari luar sekolah. Guna memperkaya wawasan para siswa, SMA BTI membekali mereka dengan seminar mengenai Pajak Daerah. Peserta didik tidak hanya diberikan ilmu pengetahuan kognitif saja, tetapi juga wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum. Adalah sebuah hal yang perlu dicanangkan kepada masyarakat secara dini, bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang sudah memiliki penghasilan demi kesejahteraan bersama. Siswa SMA merupakan bagian dari warga negara yang perlu menerima pengetahuan yang layak mengenai ketaatan membayar Pajak Daerah. SMA BTI senantiasa berperan mempersiapkan para siswa untuk menjadi bagian dari generasi penerus bangsa, supaya nantinya generasi ini dapat menjadi warga negara yang baik, yaitu taat dan bijak dalam membayar pajak, yang mana kemudian hal ini akan menjadi modal yang besar di dalam mendukung proses pembangunan nasional. Di dalam memberikan pengajaran yang berkualitas dan pengembangan wawasan yang luas bagi para siswa, SMA BTI pada kali ini membekali mereka melalui seminar dengan topik Pajak Daerah. “Pemungutan pajak merupakan suatu fungsi esensial yang harus dilaksanakan oleh negara dan hasilnya digunakan sebagai alat penggerak kegiatan, baik untuk kegiatan fungsi esensial itu sendiri maupun untuk kegiatan fungsi jasa maupun fungsi niaga” (Mustaqiem, 2008: 27). Dalam banyak hal, pengenaan Pajak Daerah bertujuan untuk menambah pendapatan daerah, khususnya pada masa otonomi daerah, yang mana kebutuhan dana untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintahan dan pembangunan daerah terbilang besar, namun sumber pendanaan yang tersedia masih sangat terbatas. Setiap daerah didorong untuk menghasilkan sumber pendapatan daerah secara kreatif, yang akhirnya dapat menunjang anggaran guna membiayai pengeluaran daerah tersebut. Aspek pengaturan dari pajak daerah dapat diterapkan dengan memberlakukan pajak daerah yang besar atas kegiatan masyarakat yang kurang diperlukan.

Dan di sisi lain, untuk kegiatan prioritas yang menghasilkan dampak positif bagi pengembangan ekonomi di masyarakat dikenakan pajak yang kecil. Di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD, yang mana didalamnya sudah termasuk pajak daerah) tampaknya berhubungan langsung dengan kinerja dari pemerintah pemda tersebut. Penambahan PAD seringkali dipakai sebagai acuan mengenai keberhasilan daerah. Inilah yang mendorong pemda untuk menciptakan berbagai jenis pajak, yang berdasarkan pemahaman mereka, dapat meningkatkan PAD tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat serta kelangsungan aktivitas perekonomian di daerahnya.
(https://www.bapenda.sukabumikab.go.id/wp-content/uploads/2021/02/pajak_daerah-1.pdf).

Para siswa SMA BTI sebagai generasi muda, diharapkan lebih paham akan Pajak Daerah, mengetahui pemanfaatannya sehingga tumbuh kesadaran untuk lebih patuh memenuhi kewajiban Pajak Daerahnya.

1.3 Solusi Permasalahan

Pajak Daerah berperan penting di dalam PAD. Pemerintah daerah sulit melakukan pembangunan jika dananya terbatas. Pajak Daerah seringkali dianggap bukan pajak, contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan lain-lain. Pajak Daerah sama posisinya seperti Pajak Pusat, hanya berbeda dalam hal otoritas. Bisa dikenakan sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

Sosialisasi tentang Pajak Daerah tidak segencar sosialisasi tentang Pajak Pusat. Padahal mengingat peranan pentingnya, Pajak Daerah seharusnya disosialisasikan lebih sering. Siswa -siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika sebagai generasi muda harus dibekali dengan pengetahuan yang benar tentang Pajak Daerah. Target dari penyuluhan ini adalah menambah wawasan tentang Pajak Daerah yang nantinya akan dapat membantu para siswa SMA BTI untuk lebih patuh dalam membayar kewajiban Pajak Daerah, serta memberikan pemahaman yang benar dan berguna agar tidak muncul pemikiran yang keliru mengenai Pajak Daerah.

Kegiatan PKM ini menyampaikan Buku Modul yang berisikan aturan Pajak Daerah untuk dibaca kembali oleh para siswa SMA BTI, supaya dapat menjadi bekal pengetahuan bagi mereka di kemudian hari. Buku Modul ini berisikan tentang tujuan, bagan isi modul, materi bahasan, dan soal-jawab sebelum dan sesudah penyuluhan untuk keperluan evaluasi atas penguasaan materi oleh para siswa. Penyuluhan ini tidak selesai pada periode semester ganjil tahun 2022/2023 saja. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, perlu diberikan penyuluhan yang berkelanjutan karena siswa-siswi SMA BTI ini akan terus digantikan oleh siswa-siswi BTI lain yang lebih muda. Pembinaan bagi para siswa di SMA BTI tidak hanya berkelanjutan tetapi juga membutuhkan berbagai mata pelajaran termasuk yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan dan aspek lainnya agar siswa dapat mandiri. Untuk itu, perlu adanya kerja sama antara pihak kurikulum atau FEB Universitas Tarumanagara dan masyarakat di lingkungan setempat, agar warga disana dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh para siswa.

Definisi pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan buat pengeluaran negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan peran serta aktif para wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut falsafah perpajakan, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan juga hak setiap warga negara untuk ikut aktif berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut”

(www.kompas.com). Aspek fiskal dari pajak adalah sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembelanjaan publik, yang meliputi belanja harian dan belanja pembangunan (Yuniarwati dkk., 2019). Hal ini jelas dikarenakan bahwa penerimaan negara berasal dari pajak bersifat sangat strategis. Tanpa adanya pajak, pemerintah akan sulit untuk melaksanakan pembangunan. Pajak digunakan untuk membayar semua biaya yang terjadi, dan jika pemerintah mempunyai saldo tersisa, dapat digunakan untuk membiayai investasi publik (Agoes dan Trisnawati, 2013). Masyarakat sangat diharapkan kesadarannya untuk membayar pajak secara tepat waktu. Kesadaran yang semakin tinggi ini dapat menambah kepatuhan Wajib Pajak di dalam membayar pajaknya. Dengan mengetahui pemanfaatan uang dari pajak, Wajib Pajak diharapkan akan menjadi lebih patuh di dalam membayar pajaknya kepada Pemerintah. Pendapatan daerah DKI Jakarta pada tahun anggaran 2021 telah mencapai 100,60%, yakni sebesar Rp 65,59 triliun dari target Rp 65,20 triliun. Angka ini berasal dari PAD sebesar Rp 41,63 triliun atau 92,15%, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 22,67 triliun atau 134,37%, serta PAD lain-lain yang sah sebesar Rp 1,28 triliun atau 40,81%. Walaupun PAD secara keseluruhan memiliki realisasi yang sangat baik, ada realisasi dari beberapa komponen PAD yang kurang dari 95%, seperti BPHTB dan PBB-P2, sebagai akibat dari pandemi Covid-19, sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta di dalam forum Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (situs resmi DPRD DKI Jakarta). Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan wawasan tambahan mengenai Pajak Daerah, terutama mengenai pajak yang dipungut oleh pemerintah beserta pemanfaatannya, yang mana para siswa SMA BTI diharapkan dapat menjadi Wajib Pajak yang patuh untuk membayar Pajak Daerah di kemudian hari. Di samping itu, juga untuk memberikan pengetahuan yang benar dan bermanfaat, agar tidak muncul pandangan yang keliru mengenai Pajak Daerah di kalangan para siswa BTI.

PKM ini memberikan Buku Modul tentang Pajak Daerah agar dapat dipelajari kembali dan menjadi bekal hidup para siswa SMA BTI di kemudian hari. Isi dari Modul tersebut adalah pendahuluan, pembahasan, penutup, dan soal-jawab untuk latihan serta evaluasi atas penguasaan materi. SMA BTI perlu menyelenggarakan penyuluhan dalam bentuk seminar yang berkelanjutan, dengan mengingat para siswa SMA BTI pada saat ini akan digantikan oleh para siswa yang duduk di kelas yang lebih rendah, yang mana mereka juga masih memerlukan seminar ini. Seminar bagi para siswa SMA BTI juga perlu diadakan dengan topik-topik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan bidang lainnya untuk membekali para siswa sehingga mereka dapat hidup dengan lebih baik di masa depan. Untuk itu, perlu ada jalinan kerja sama antar Program Studi atau Fakultas di lingkungan Universitas Tarumanagara, serta kerja sama dengan masyarakat setempat, terutama dalam memberdayakan warga sekitar, agar mereka dapat bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi para siswa nantinya.

2. METODE PELAKSANAAN

Setiap dosen pada dasarnya wajib untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain melakukan pengajaran dan penelitian, dosen juga wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Kegiatan PKM ini dapat terlaksana karena ada kesesuaian kepentingan antara dosen dan peserta didik di SMA BTI. Sesuai surat undangan No.007/C.IV.II/SMA BT.IKA/VII/2022 berasal dari Kepala Sekolah (Bpk. Edi Fredi S. Ag), kami melaksanakan kegiatan PKM pada periode semester ganjil 2022-2023 ini. Harapan yang ingin dicapai dari pelaksanaan aktivitas ini adalah agar dapat memberikan pemahaman yang benar terkait Pajak Daerah. Aktivitas PKM ini terselenggara pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, Pk. 10.00 – 12.00 WIB.

Berikut ini adalah susunan acara dari aktivitas PKM yang telah kami lakukan :

Pk.10.00-10.15	Pembukaan: Kata Sambutan dan Foto Bersama
Pk. 10.15-11.00	Pemaparan Sesi I – Pembicara: Yuniarwati
Pk. 11.00-11.15	Sesi Tanya-Jawab
Pk. 11.15-12.00	Sesi II – Pembicara: Yuniarwati, dilanjutkan dengan Penutupan

Penyuluhan ini dilakukan dalam 2 sesi pemaparan materi. Evaluasi dilaksanakan pada akhir acara dengan menyampaikan kuis secara ekspresif, serta di tengah-tengah jalannya acara diadakan penyebaran angket untuk memperoleh tanggapan dari para peserta atas kegiatan PKM ini.

3. HASIL KEGIATAN PPKM

Kegiatan PKM ini telah berjalan dengan lancar. Para peserta telah mengikuti jalannya acara ini dari awal hingga akhir. Buktinya, para siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan lancar pada sesi tanya-jawab. Rekapitulasi jawaban dari para peserta atas pertanyaan yang didistribusikan melalui kuesioner, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Peserta

Pertanyaan	Rata-Rata Pra-Semin ar	Rata-Rata Pasca- Seminar	Selisih Rata-Rata
1. Pengetahuan Pajak Daerah sangat penting	4,7	4,9	0,20
2. Pajak Daerah menunjang pembangunan	4,5	4,8	0,30
3. Pajak Daerah tidak membebani masyarakat	4,0	4,7	0,70
4. Pajak Daerah perlu disosialisasikan lebih banyak lagi	4,1	4,4	0,30
5. Warga negara yang baik taat membayar Pajak Daerah	4,7	4,9	0,20
6. Saya membayar Pajak Daerah dengan tepat	3,7	4,9	1,20

Pada Tabel 1 diatas, terlihat bahwa dari 6 pertanyaan yang disampaikan, terdapat perbedaan nilai rata-rata yang positif. Hal ini menandakan bahwa setelah mengikuti seminar ini, pengetahuan para siswa menjadi meningkat.

Kegiatan PKM ini menghasilkan luaran berupa Modul Pajak Daerah. Diharapkan dengan mengikuti seminar ini, pengetahuan para siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika menjadi bertambah, guna memahami Pajak Daerah di Indonesia. Di bawah ini adalah foto-foto kegiatan pada saat acara seminar diselenggarakan :





4. KESIMPULAN DAN SARAN

Seminar mengenai Pajak Daerah dan pemanfaatannya yang diperuntukkan bagi para siswa SMA BTI sudah terselenggara dengan sukses. Para siswa secara antusias mengikuti acara seminar ini dan mereka dapat menjawab pertanyaan yang diberikan dengan tepat, sesuai dengan materi yang disampaikan. Keberlanjutan kegiatan PKM ini sangat dibutuhkan guna mempersiapkan para siswa untuk senantiasa mengikuti dinamika perpajakan di Indonesia. Kegiatan PKM selanjutnya kiranya dapat menggunakan topik yang lain di bidang perpajakan. Para siswa juga memerlukan kegiatan seperti ini guna memperkaya pengetahuan dan wawasan mereka.

Ucapan Terima Kasih

Kami menghaturkan banyak terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara beserta seluruh staf yang terlibat, dan juga kepada Dekan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, atas terlaksananya kegiatan PKM ini dengan baik. Tak lupa, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah beserta para guru yang mengajar di SMA BTI, Jakarta Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sukrisno dan Trisnawati, Estralita (2013) Akuntansi Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta
- Anggadini, S.D, Surtikanti.S, Bramasto. A, Fahrana. E (2022), *Determination of Individual Taxpayers Compliance in Indonesia: A Case Study*, *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, Vol.9 N0.1 (2022), 130
- Iraman,Endra, Ono and Makoko (2021) *The Compliance and Social Desirability Bias of Taxpayers: Experimental Evidence from Indonesia*, Cambridge University Press
- Mustaqiem, 2008. Pajak Daerah. FH UII Press. Yogyakarta
- Yuniarwati, Widjaja.P.H, dkk (2019) Belajar Mudah Perpajakan, Mitra Wacana Media, Jakarta
- https://www.bapenda.sukabumikab.go.id/wpcontent/uploads/2021/02/pajak_daerah-1.pdf

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/realisasi-pendapatan-daerah-dki-jakarta-2021-capai-1006-dari-target>
<https://dprd-dkijakartaprof.go.id/wagub-dki-pendapatan-daerah-di-2021-mencapai-realisisasi-sangat-baik/>
<https://money.kompas.com/read/2022/01/14/110000426/mengenal-apbn--pengertian-tujuan-fungsi-dan-strukturnya-?page=all>
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-rapbn-2022-pemulihan-ekonomi-dan-reformasi-struktural/>
<https://nasional.kontan.co.id/news/melebihi-target-realisisasi-penerimaan-pajak-di-2021-capai-rp-12775-triliun>
www.btika.sch.id